



**Komisi Pemilihan Umum
Kota Probolinggo**

LAPORAN KEUANGAN DIPA 076 TA. 2021



KPU KOTA PROBOLINGGO



KPU PROBOLINGGO



KPUKotaProbolinggo



<https://www.youtube.com/channel/UC1uxW-w4sR75811yF3Q>



<http://kota-probolinggo.kpu.go.id/>



kpuprobkota@gmail.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementrian Negara/Lembaga yang di pimpinnya.

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akrual dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor KPU Kota Probolinggo. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Probolinggo, Januari 2022

Sekretaris KPU Kota Probolinggo *ft*



AGUS SETIYONO, ST

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	23
D. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional	28
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	34
F. Pengungkapan Lain-Lain	37
VI. Lampiran	



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

Alamat : Jl. Panglima Sudirman No. 514 Probolinggo 67216
Telp.(0335) 436455 Fax.426141

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Probolinggo, Januari 2022

Sekretaris KPU Kota Probolinggo *ft*



AGUS SETIYONO, ST

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo (658021) Tahun Anggaran 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan - LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2021 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp. 86.148.540 atau mencapai 0 % dari estimasi pendapatan-LRA sebesar Rp. 0 Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 3.231.483.906 atau mencapai 98.88 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 3.268.140.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2021, Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 835,903,297 yang terdiri dari : Aset Lancar (neto) sebesar Rp. 0, Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 835,721,177 Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 182,120 Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 835,903,297

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0 , sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 3,590,868,900 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (3,590,868,900) Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 85,117,220 dan sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (3,505,751,680).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp. 973,128,838 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. (3,505,751,680) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 223,190,773 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 3,145,335,366 Sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp. 836,903,297

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam Rp.)

Uraian	Catatan	TH. 2021		% Realisasi terhadap Anggaran	TH.2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
A. Pendapatan	B.1				
1. Penerimaan Perpajakan		0	0	0.00	0
2. Pendapatan Negara Bukan Pajak		0	86,148,540	0.00	57,102,997
Jumlah Pendapatan		0	86,148,540	0.00	57,102,997
B. Belanja	B.2				
1. Belanja Pegawai	B.3	2,155,572,000	2,136,417,000	99.11	2,060,736,596
2. Belanja Barang	B.4	1,112,568,000	1,095,066,365	98.43	754,778,776
3. Belanja Modal	B.5	0	0	0.00	0
Jumlah Belanja		3,268,140,000	3,231,483,906	98.88	2,815,515,372

II. NERACA

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TH. 2021	TH. 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Persediaan	C.2	0	135,206,052
JUMLAH ASET LANCAR		0	135,206,052
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.3	1,762,428,698	1,784,173,230
Gedung dan Bangunan	C.4	363,135,000	363,135,000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.5	5,500,000	5.500.000
Akumulasi Penyusutan	C.6	(1,295,342,521)	(1,317,324,447)
JUMLAH ASET TETAP		835,721,177	835,483,783
ASET LAINNYA			
Aset Lain-Lain	C.7	321,507,032	299,762,500
Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya	C.8	(321,324,912)	(297,323,497)
JUMLAH ASET LAINNYA		182,120	2,439,003
JUMLAH ASET		835,903,297	973,128,838
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.9	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		0	0
JUMLAH KEWAJIBAN		0	0
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas	C.10	835,903,297	973,128,838
JUMLAH EKUITAS		835,903,297	973,128,838
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		835,903,297	973,128,838

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO
LAPORAN OPERASIONAL (LO)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TH. 2021	TH. 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	0	0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		0	0
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	2,136,417,541	2,060,736,596
Beban Persediaan	D.3	214,245,132	24,370,000
Beban Barang dan Jasa	D.4	641,537,855	602,639,476
Beban Pemeliharaan	D.5	182,858,610	84,172,300
Beban Perjalanan Dinas	D.6	190,599,500	43,597,000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	225,210,262	197,282,798
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		3,590,868,900	3,012,798,170
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(3,590,868,900)	(3,012,798,170)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8		
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		78,123,456	57,102,997
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		78,123,456	57,102,997
Surplus/(Defisit) Penyelenggaraan Kewajiban Jangka Panjang			
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		8,025,084	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1,031,320	0
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		6,993,764	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		85,117,220	57,102,997
POS LUAR BIASA	D.9		
Beban Luar Biasa		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) - LO		(3,505,751,680)	(2,955,695,173)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TH. 2021	TH. 2020
EKUITAS AWAL	E.1	973,128,838	970,088,936
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(3,505,751,680)	(2,955,695,173)
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		223,190,773	200,322,700
Penyesuaian Nilai Aset	E.3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.4	0	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.4	225,090,776	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.5	0	214,234,000
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.6	(1,900,000)	(13,911,300)
Koreksi Lain-Lain	E.7	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.8	3,145,335,366	2,758,412,375
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(137,225,541)	3,039,902
EKUITAS AKHIR	E.9	835,903,297	973,128,838

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**A. PENJELASAN UMUM**

Dasar Hukum
Efektivitas dan
Rencana
Strategis

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO (658021)

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Rencana Strategis KPU Kota Probolinggo Tahun 2021 mengacu pada Renstra Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Surat Keputusan KPU Nomor : 197/PR.01.3-KPt/01/KPU/IV/2021 tentang rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021 – 2024. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2021-2024) adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas", yaitu :

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas .

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu " Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat, efektif", yaitu :

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil" yaitu "Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik."

A.2 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo (658021). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3 BASIS AKUNTANSI

Kantor Komisi Pemilihan Kota Probolinggo (658021) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran***A.4 DASAR PENGUKURAN**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sesuai pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi***A.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo (658021) Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo (658021) adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan -LRA

- ❖ Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

*Pendapatan -
LRA*

- ❖ Akuntansi penapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- ❖ Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan –
LO*

(2) Pendapatan - LO

- ❖ Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- ❖ Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan jasa pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- ❖ Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- ❖ Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- ❖ Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- ❖ Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- ❖ Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- ❖ Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban***(4) Beban**

- ❖ Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- ❖ Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- ❖ Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset***(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan aset Lainnya.

*Aset Lancar***a) Aset Lancar**

- ❖ Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- ❖ Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito di catat sebagai nilai nominal
- ❖ Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkan surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- ❖ Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). hal ini diwujudkan dengan membenuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan Pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5 %
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tiadk dilakukan pelunasan.	10 %
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50 %
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100 %
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara / DJKN	

- ❖ Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan / Ganti Rugi/(TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- ❖ Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset Tetap***b. Aset Tetap**

- ❖ Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- ❖ Nilai Aset disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- ❖ Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut diatas, diperlukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- ❖ Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasikan ke Aset Lain-Lain pada proses Aset Lainnya.
- ❖ Aset tetap yang secara permanen di hentikan penggunaanya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN /BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- ❖ Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Penyusutan Aset Tetap

- ❖ Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- ❖ Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- ❖ Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- ❖ Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut

Pengelolaan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 Tahun
Aset tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 Tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- ❖ Piutang Jagka Panjang piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- ❖ Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- ❖ Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan aset yang dibatasi penggunaannya.
- ❖ Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- ❖ Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- ❖ Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara Umum table masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol I,II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produsen Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. 1	70

- ❖ Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- ❖ Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- ❖ Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- ❖ Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih selisih antara aset dan *kewajiban* dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan adanya perubahan sesuai dengan kebutuhan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	Tahun 2021	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Direvisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	2,121,985,000	2,155,572,000
Belanja Barang	725,232,000	1,112,568,000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	2,847,217,000	3,268,140,000

Realisasi
pendapatan
Rp. 86,148,540

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 86.148.540 atau mencapai 0,00 % dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0.

Pendapatan KPU Kota Probolinggo terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp. 0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 86.148.540.

Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya lelang bilik suara berbahan aluminium serta pengembalian honor pokja pemilu tahun 2019 hasil audit BPK atas LK Tahun 2019.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasi adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Tahun 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Anggaran
Penerimaan Perpajakan	0	0	0.00
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	86,148,540	0.00
Jumlah Pendapatan dan Hibah	0	86,148,540	0.00

Realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 50,87 persen disbanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi TA. 2021 dan TA. 2020

Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Naik (Turun) %
Penerimaan Perpajakan	0	0	0.00
Penerimaan Negara Bukan Pajak	86,148,540	57,102,997	50.87
Jumlah	86,148,540	57,102,997	50.87

Realisasi
Penerimaan
Pajak Rp. 0

B.1.1 PENERIMAAN PAJAK

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 . penerimaan pajak TA.2021 sebesar 0.00 persen dari TA. 2020.

Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak TA. 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Naik (Turun) %
Penerimaan Pajak	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

Realisasi
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Rp.
86.148.540

B.1.2 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp. 86.148.540 dan Rp. 57.102.997.

Penerimaan Negara Bukan Pajak TA. 2021 mengalami kenaikan sebesar 50,87 dari TA. 2020. Ini di karenakan pada tahun 2021 ada lelang bilik suara serta adanya setoran pengembalian belanja pokja pemifu tahun 2019 hasil audit BPK atas Laporan Keuangan TA. 2019.

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA. 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak	86.148.540	57.102.997	50.87
Jumlah	86.148.540	57.102.997	50.87

Sedangkan Rincian PNPB adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	78.123.456	57.102.997	36,81
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	84	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	8.025.00	0	100
Jumlah	86.148.540	57.102.997	50.87

Realisasi Belanja Negera
Rp.
3,231,483,906

B.2 BELANJA

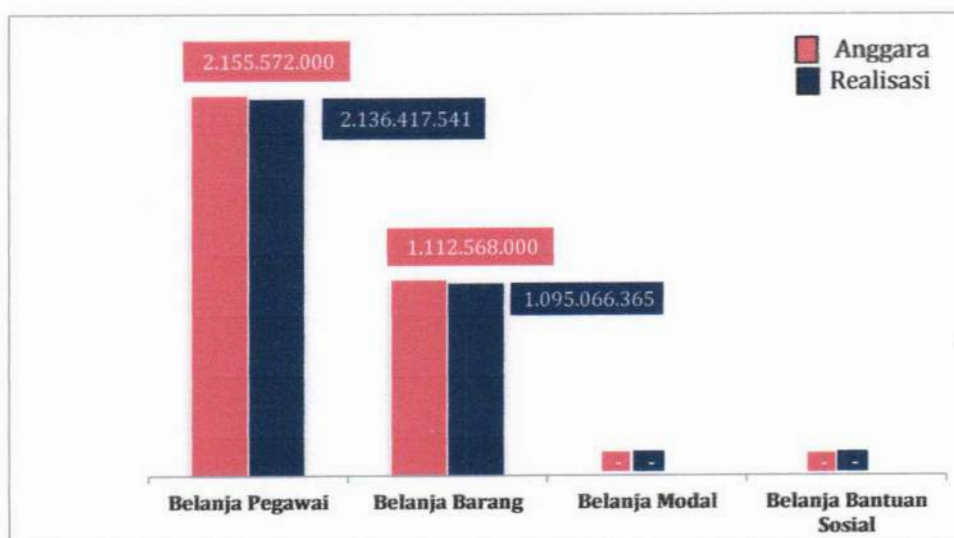
Realisasi belanja Kantor KPU Kota Probolinggo (658021) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 3,231,483,906 atau sebesar 98.88 % dari anggaran belanja sebesar Rp. 3,268,140,000

Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA. 2021

Uraian	Rincian Anggaran dan Relisasi Belanja TA. 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Anggaran
Belanja Pegawai	2,155,572,000	2,136,417,541	99.11
Belanja Barang	1,112,568,000	1,095,066,365	98.43
Belanja Modal	0	0	0.00
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00
Jumlah	3,268,140,000	3,231,483,906	98.88

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat di lihat dalam grafik berikut ini :



Dibandingkan dengan TA. 2020 Realisasi TA. 2021 mengalami kenaikan sebesar 14,77 % hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 KPU Kota Probolinggo mendapatkan hibah operasional non tahapan dari Pemerintah Kota Probolinggo.

Berikut rincian realisasi belanja TA. 2021 dan TA. 2020 :

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan A. 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi TA. 2021	Realisasi TA. 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2,136,417,541	2,060,736,596	3.67
Belanja Barang	1,095,066,365	754,778,776	45.08
Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah	3,231,483,906	2,815,515,372	14.77

Belanja Pegawai
Rp.
2,155,572,000

B.2.1 BELANJA PEGAWAI

Realisasi belanja pegawai per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 2,136,417,541 dan Rp. 2,060,736,596. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negari Sipil (PNS), dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai pada Tahun 2021 mengalami Kenaikan sebesar 3,67 % dari Tahun 2020. Hal ini disebabkan pada tahun 2021 adanya pegawai DPK yang alih status menjadi pegawai Sekretariat KPU, serta adanya kenaikan pangkat pada pegawai sekretariat KPU di Tahun 2021.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan TA 2021 dan 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Naik (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	470,834,900	374,801,080	25.62
Belanja Pembulatan Gaji PNS	8,488	5,139	65.17
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	28,865,880	22,215,430	29.94
Belanja Tunj. Anak PNS	11,816,174	8,886,172	32.97
Belanja Tunj. Struktural PNS	25,920,000	22,680,000	14.29
Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	0	0.00
Belanja Tunj. PPh PNS	24,064,020	30,443,200	(20.95)
Belanja Tunj. Beras PNS	31,575,120	21,726,000	45.33
Belanja Uang Makan PNS	131,485,000	143,497,000	(8.37)
Belanja Tunj. Umum PNS	20,480,000	15,870,000	29.05
Belanja Uang Lembur	0	0	0.00
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1,391,368,013	1,420,612,575	(2.06)
Realisasi Belanja Pegawai Bruto	2,136,417,595	2,060,736,596	3.67
Pengembalian Belanja	54	0	0.00
Realisasi Belanja Pegawai Netto	2,136,417,541	2,060,736,596	3.67

Belanja Barang
Rp.
1,095,066,365

B.2.2 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.095.066.365 dan Rp. 754,778,776. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi belanja barang Periode Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 45.08 % dari realisasi belanja Periode Tahun 2020. Hal ini antara lain disebabkan karena di tahun 2021 terdapat dana hibah operasional non pemilihan dari pemerintah kota probolinggo.

Perbandingan Belanja Barang Tahunan TA 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	437,628,155	404,314,800	8.24
Belanja Barang Non Operasional	81,884,600	58,985,354	38.82
Belanja Jasa	122,025,100	139,339,322	(12.43)
Belanja Pemeliharaan	182,858,610	84,172,300	117.24
Belanja Perjalanan Dinas	190,599,500	43,597,000	337.18
Belanja Barang Persediaan	80,070,400	24,370,000	228.56
Jumlah Belanja Kotor	1,095,066,365	754,778,776	45.08
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah Belanja Bersih	1,095,066,365	754,778,776	45.08

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemic covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid 19 adalah sebesar Rp. 27,900,000. Anggaran tersebut terealisasi Rp. 26,759,005 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang Untuk penanganan pandemic covid-19 TA. 2021

Uraian	Aggaran	Realisasi TA. 2021	%
Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19	23,940,000	23,269,305	97.20
Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19	3,000,000	2,989,700	99.66
Belanja Barang Persediaan – Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	0.00
Belanja Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19	960,000	500,00	52.08
Jumlah Belanja	27,900,000	26,759,005	95.01

Belanja Modal
Rp. 0

B.2.3 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat dari satu periode akuntansi.

Pada tahun 2021 tidak terdapat realisasi belanja modal, di karenakan tidak terdapat anggaran belanja modal di tahun 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA. 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0.00
Jumlah Belanja	0	0	0.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di
bendahara
Pengeluaran
Rp. 0

C.1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang di kuasai, di kelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum di pertanggungjawabkan atau belum di setorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Uang Tunai di Brankas Bendahara	0	0
Uang di Kas Bank	0	0
Jumlah	0	0

Persediaan
Rp. 0

C.2 PERSEDIAAN

Nilai persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 135,206,052

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk di jual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Persediaan Tahun 2021 dan 2020

URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2020
Barang Konsumsi	0	0
Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0
Bahan Baku	0	0
Persediaan Lainnya	0	135,206,052
Jumlah	0	135,206,052

Persediaan
yang belum
Diregister
Rp. 0

C.3 PERSEDIAAN YANG BELUM DI REGISTER

Nilai persediaan yang belum di register per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp.0

Peralatan dan
Mesin
Rp.
1,762,428,698

C.4 PERALATAN DAN MESIN

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 1,762,428,698, dan Rp. 1,784,173,230

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	1,784,173,230
Mutasi Tambah :	
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang :	
Penghentian dari penggunaan	21,744,532
Saldo per 31 Desember 2021	1,762,428,698
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	(1,251,385,670)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	511,043,028

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa :

Uraian Barang	Nilai Barang
Kursi Besi /Metal	1,821,200
Microphone Table Stand	1,283,332
Uninterruptible Power Supply (UPS)	6,435,000
Facsimile	12,205,000
Jumlah Barang	21,744,532

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Keuangan ini

Peralatan dan
Mesin
Rp. 0

C.5 PERALATAN DAN MESIN BELUM DI REGISTER

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Di Register per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp. 0 dan Rp. 0

Gedung dan
Bangunan
Rp. 363,135,000

C.6 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah Rp. 363,135,000 dan Rp. 363,135,000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	363,135,000
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2021	363,135,000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	(42,444,351)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	320,690,649

Gedung dan bangunan KPU Kota Probolinggo adalah Pembangunan Gudang Logistik yang di bangun pada Tahun 2006 dan gedung kantor KPU Kota Probolinggo yang merupakan aset pemerintah kota probolinggo.

Rincian Aset Gdeung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laproran Keuangan Ini.

Gedung dan
Bangunan
Rp. 0

C.7 GEDUNG DAN BANGUNAN BELUM DIREGISTER

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desmber 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

Jalan, Jaringan
dan Irigasi
Rp. 5.500.000

C.8 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp. 5.500.000 dan Rp. 5.500.000.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2020	5.500.000
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo Per 31 Desember 2021	5.500.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	(1,512,500)
Nilai Buku per 30 Desember 2021	3,987,500

Jalan, Jaringan
dan Irigasi
Rp. 0

C.9 ASET TETAP YANG BELUM DI REGISTER

Saldo Aset Tetap yang belum deregister per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp. 0 and Rp. 0

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tatap
Rp.
(1,295,342,521)

C.10 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp. 1,295,342,521 dan Rp. 1,317,324,447. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan Tahun 2021

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1,762,428,698	(1,251,385,670)	511,043,028
2	Gedung dan Bangunan	363,135,000	(42,444,351)	320,690,649
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.500.000	(1,512,500)	3,987,500
	Akumulasi Penyusutan	2,131,063,698	(1,295,342,447)	835,721,177

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada laporan keuangan ini.

Aset lain-lain
Rp.321,507,032

C.11 ASET LAIN-LAIN

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp. 321,507,032 dan Rp. 299,762,500.

Aset lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi di gunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2020	299,762,500
Mutasi Tambah	
- Reklasifikasi dari aset tetap	21,744,532
Mutasi Kurang	
- Penggunaan kembali BMN yang di hentikan	0
- Penghapusan BMN	0
Saldo Per 31 Desember 2021	321,507,032
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	(321,324,912)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	182,120

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan/Amortasi Aset
Lainnya
Rp. 321,324,912

C.12 AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTASI ASET LAINNYA

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp. 321,324,912 dan Rp. 297,323,497. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Sedangkan Amortasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau di beli oleh satker. Amortasi ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortasi.

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortasi Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-Lain	321,507,032	(321,324,912)	182,120
Jumlah	321,507,032	(321,324,912)	182,120

Hibah yang belum di sahkan Rp. 0

C.13 HIBAH YANG BELUM DI SAHKAN

Nilai hibah yang belum disahkan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Hibah yang belum di sahkan merupakan hibah yang belum di sahkan KPPN sampai dengan tanggal pelaporan.

Uang Muka dari KPPN Rp. 0

C.14 UANG MUKA DARI KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp 0

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	0
Tambahan Uang Persediaan	0
Jumlah	0

Ekuitas Rp. 835,903,297

C.15 EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp. 835,903,297 dan Rp. 973,128,838

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
Perpajakan
Rp. 0

D.1 PENDAPATAN PERPAJAKAN

Jumlah pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 201 dan 2020 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Realisasi Pendapatan Perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0.00 persen.

Pendapatan
Negara Bukan
Pajak Rp. 0

D.2 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

Jumlah Penapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Realisasi Pendapatan Perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0.00

Pendapatan
Hibah

D.3 PENDAPATAN HIBAH

Jumlah Penapatan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Realisasi Pendapatan Hibah dari tahun sebelumnya sebesar 0.00

Beban Pegawai
Rp.
2,136,417,541

D.4 BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 2,136,417,541 dan Rp. 2,060,736,596

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum bestatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar 3.67 % di sebabkan oleh adanya pegawai DPK yang alih status menjadi pegawai Sekretariat KPU, serta ada beberapa pegawai Sekretariat KPU yang naik pangkat pada tahun 2021.

Rincian Beban Pegawai Tahunan TA. 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan TA. 2021 dan 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Naik (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	470,834,900	374,801,080	25.62
Belanja Pembulatan Gaji PNS	8,488	5,139	65.17
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	28,865,880	22,215,430	29.94
Belanja Tunj. Anak PNS	11,816,174	8,886,172	32.97
Belanja Tunj. Struktural PNS	25,920,000	22,680,000	14.29
Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	0	0.00
Belanja Tunj. PPh PNS	24,064,020	30,443,200	(20.95)
Belanja Tunj. Beras PNS	31,575,120	21,726,000	45.33
Belanja Uang Makan PNS	131,485,000	143,497,000	(8.37)
Belanja Tunj. Umum PNS	20,480,000	15,870,000	29.05
Belanja Uang Lembur	0	0	0.00
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1,391,368,013	1,420,612,575	(2.06)
Realisasi Belanja Pegawai Bruto	2,136,417,595	2,060,736,596	3.67
Pengembalian Belanja	54	0	0.00
Realisasi Belanja Pegawai Netto	2,136,417,541	2,060,736,596	3.67

Beban
Persediaan
Rp.
214,245,132

D.5 BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 214,245,132 dan Rp. 24,370,000

Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian beban persediaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Persediaan Tahun 2021 dan 2020

Uraian Jenis Beban	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	42,504,400	24,370,000	74.41
Beban Persediaan Bahan Baku	37,566,000	0	0.00
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0.00
Beban Persediaan Lainnya	134,174,732	0	0.00
Jumlah Beban Persediaan	214,245,132	24,370,000	779.13

Beban Barang
dan Jasa
Rp. 641,537,855

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 641,537,855 dan Rp. 602,639,476

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban Barang dan jasa tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 6.45 % di bandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan pada tahun 2021 KPU Kota Probolinggo mendapatkan dana operasional Hibah Non Tahapan dari Pemerintah Kota Probolinggo.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020

Uraian Jenis Beban	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	289,147,850	294,343,800	(1.76)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,046,000	701,000	49.21
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	110,520,000	99,270,000	11.33
Beban Barang Operasional Lainnya	13,645,000	10,000,000	36.45
Beban Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19	23,269,305	0	0.00
Beban Bahan	72,794,900	28,188,500	158.24
Beban Honor Output Kegiatan	3,600,000	9,550,000	(62.30)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	2,500,000	0	0.00
Beban Barang Non Operasional- Penanganan Pandemi COVID-19	2,989,700	21,246,854	(38.70)
Beban Langganan Listrik	19,913,100	32,487,822	(38.70)
Beban Langganan Telephon	4,000,000	0	0.00
Beban Langganan Air	660,000	12,551,500	(94.74)
Beban Jasa Profesi	2,700,000	3,400,000	(20.58)
Beban Jasa Lainnya	94,252,000	34,500,000	173.19
Beban Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	500,000	56,400,000	(99.11)
Jumlah	641,537,855	602,639,476	6.45

Beban
Pemeliharaan
Rp. 182,858,610

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp. 182,858,610 dan Rp. 84,172,300

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan 2021 dan 2020

Uraian Jenis Beban	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	73,978,300	18,859,000	292.27
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	108,880,310	65,313,300	66.70
Jumlah	182,858,610	84,172,300	117.24

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp. 190,599,500

D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp. 190,599,000 dan Rp. 43,597,000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan 2021 dan 2020

Uraian Jenis Beban	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	43,221,500	43,297,000	(0.16)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	31,500,000	300,000	0.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	115,878,000	0	0.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0.00
Jumlah	190,599,500	43,597,000	337.18

Beban
Penyusutan
dan Amortasi
Rp.
225,210,262

D.7 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 225,210,262 dan Rp. 197,282,798

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*de preciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi di gunakan untuk mencatat alokasi penurunan mafaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban penyusutan dan amortasi Tahun 2021 dan 2020

Uraian Jenis Beban	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	214,791,232	187,022,720	14.84
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9,432,078	9,432,078	0.00
Beban Penyusutan Jaringan	137,500	137,500	0.00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak di gunakan dalam operasional Pemerintah	849,452	690,500	23.01
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	225,210,262	197,282,798	14.15

Surplus dari Kegiatan Non Operasional RP. 78,123,456

D.8 SURPLUS(DEFISIT) PENJUALAN ASET NON LANCAR

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masih-masing sebesar Rp. 78,123,456 dan 57,102,997

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lacar Tahunan TA. 2021 dan 2020

Uraian Jenis Beban	Realisasi TA. 2021	Realisasi TA. 2020	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	78,123,456	57,102,997	37.00
Jumlah	78,123,456	57,102,997	37.00

Surplus (Defisi) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Rp. 0

D.9 SURPLUS (DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp. 8,025,084

D.8 SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Pas Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak rutin* dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan No Operasional Tahunan TA. 2021 dan 2020

Uraian Jenis Beban	Realisasi TA. 2021	Realisasi TA. 2020	Naik (Turun) %
Penerimaan Kembali Beban Pegawai TA. Yang lalu	84	0	0.00
Penerimaan Kembali Beban Barang TA. Yang lalu	8.025.000	0	0.00
Jumlah	8,025,084	0	0.00

Pos Luar Biasa
Rp. 0

D.9 POS LUAR BIASA

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Uraian Jenis Beban	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan PNB	0	0	0.00
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0.00
Beban Persediaan	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LEPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp.
973,128,838

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp. 973,128,838 dan Rp. 970,088,936

Surplus/Defisit –
LO Rp.
(3,505,751,680)

E.2 SURPLUS (DEFISIT) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. (3,505,751,680) dan Rp. (2,955,695,173)
Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus defisit kegiatan operasional, surplusdefisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi/Kes
alahan
Mendasar Rp.
0.00

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan mendasar untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas pada tahun pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp. 223,190,773 dan 200,322,700 yaitu sebagai berikut :

Penyesuaian
Nilai Aset
Rp. 0

E.4.1 PENYESUAIAN NILAI ASET

Nilai Penyesuaian Aset untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp. 0

E.4.2 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan daalm penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp. 0 dan Rp.0

Koreksi Atas
Reklasifikasi
Rp.
225,090,776

E.4.3 KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI

Koreksi atas Reklasifikasi Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 225,090,776 dan 0.

Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

JENIS KOREKSI	NILAI KOREKSI
Koreksi atas Reklasifikasi PERSediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	225.990.776
JUMLAH	225.090.776

Selisih
Revaluasi Aset
tetap Rp.
214,234,000

E.4.4 SELISIH REVALUASI ASET TETAP

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian aset tetap.

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp. 0 dan Rp. 214,234,000 .

Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp.
(1,900,000)

E.4.5 KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. (1,900,000) dan Rp. (13,911,300)

Koreksi Lain-
Lain
Rp. 0

E.4.6 KOREKSI LAIN-LAIN

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi
Antar Entitas
Rp.
3,145,335,366

E.5 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 3,145,335,366 dan Rp. 2,758,412,375

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berada baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2021

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagikan ke Entitas Lain	2,842,626,896
Diterima dari Entitas Lain	(86,148,540)
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	0
Pengesahan Hibah Langsung	400,000,000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(11,142,990)
Jumlah	3,145,335,366

E.5.1 DITERIMA DARI ENTITAS LAIN (DDEL)/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DKEL sebesar Rp. 2.842.626.896 sedangkan DDEL sebesar Rp. 86.148.540

E.5.2 TRANSFER MASUK/TRANSFER KELUAR

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan asset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL dengan BA BUN. Transfer keluar sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0.

E.5.3 PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai Rp. 400.000.000. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 11.142.990.

*Ekuitas Akhir
Rp.
835,903,297*

E.6 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp. 835.903.297 dan Rp. 973.128.838

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**F.1 TINDAK LANJUT ATAS LHP BPK TAHUN 2020**

Menindaklanjuti surat Plt. Sekretaris KPU Provinsi Jatim Tanggal 11 April 2021 Nomor : 184/PW.02.1-SD/35/Sek.Prov/IV/2021 tentang Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan KPU Tahun 2020, menyikapi konsep temuan atas pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2020, KPU Kota Probolinggo sudah melakukan penyetoran ke Kas Negara senilai Rp. 8.025.000. Bukti Setor Pengembalian ke Kas Negara di sajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini.

F.2 DANA HIBAH OPERASIONAL NON PEMILIHAN

Pada tahun 2021 KPU Kota Probolinggo menerima dana hibah operasional non pemilihan dari Pemerintah Kota Probolinggo dengan Nomor NPHD : 900/1602/425.206/2021, 1/KU.04/3574/2021 Tanggal 05 November 2021 senilai Rp. 400.000.000 dan di tampung di rekening Bank Jatim dengan Nama Rekening : RPL 035 PDHL KPU KOTA PROBOLINGGO, dengan Nomor Rekening : 0121065843. Sudah di lakukan Register ke Kanwil sesuai dengan Surat Kanwil Nomor S-3292/WPB.16/2021 Tanggal 17 Nopember 2021 dengan Nomor Register 2W1JZPRA.

F.2 REKENING PEMERINTAH

Daftar Rekening yang dimiliki oleh kantor ,KPU Kota Probolinggo pada pelaksanaan anggaran Tahun 2020 ada 1 buah rekening yaitu : Rekening yang menampung anggaran DIPA 076, pada rekening Mandiri KC Probolinggo dengan Nama Rekening Virtual Pengeluaran : BPG 035 KPU Kota Probolinggo, nomor Rekening Virtual Pengeluaran : 8100126580211000 berdasar pada surat persetujuan pembukaan rekening virtual pengeluaran dari KPPN Bondowoso Nomor : 000646/035 Tanggal 30 Juni 2021.

F.2 LELANG BMN TAHUN 2021

Pada Tahun 2021 KPU Kota Probolinggo melaksanakan lelang penjualan bilik suara berbahan aluminium, Risalah Lelang di sajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini.